



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 2/DJU/HM.02.3/1/2023

Jakarta, 2 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Perluasan Satuan Kerja Implementasi  
SPPT-TI

Yth. **Ketua Pengadilan Tinggi**

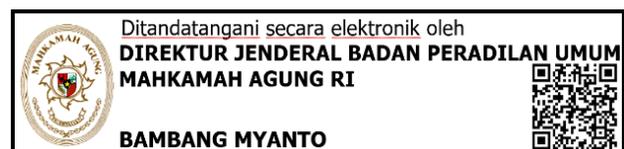
**di**

**Seluruh Indonesia**

Menindaklanjuti surat Menko Polhukam Nomor B.129/HK.00.01/10/2022 hal Pengembangan dan Implementasi SPPT-TI, bersama ini disampaikan bahwa implementasi SPPT-TI tahun 2023 akan dilakukan perluasan satuan kerja secara nasional pada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta penambahan jenis data tindak pidana korupsi.

Terkait hal tersebut Pengadilan Tinggi perlu segera untuk melakukan sosialisasi SPPT-TI dengan berpedoman pada Buku SPPT-TI yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dan meningkatkan pengawasan berjenjang serta melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap akurasi dan kelengkapan data karena penilaian terhadap keakuratan data dan kelengkapan data yang bersumber dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri akan mempengaruhi nilai implementasi SPPT-TI Mahkamah Agung secara keseluruhan.

Demikian untuk segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. YM Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI;
4. Yth Deputi Bidkooor Hukum dan Ham Kemenko Polhukam RI.